

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Gambaran Umum Kota Batu

Kota Batu merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Batu terletak 90 km sebelah barat laut Malang dan sebelah barat daya Surabaya atau 15 km. Kota Wisata Batu berada dijalur yang menggabungkan Malang-Jombang setrta Malang-Kediri. Kota Batu berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Mojokerto di sebelah utara juga dengan Kabupaten Malang di daerah Timur, Barat dan Selatan. Daerah Kota Batu berada di Ketinggian 700-1700 diatas permukaan laut dengan suhu udara dapat mencapai 12-19 Celcius. Kota Batu sendiri terletak di 7,44'o sampai pada 8,26'o lintang selatan serta 122,17'o sampai pada 122,57' o Bujur timur.¹ Bererapa gunung yang berada di Kota Batu yaitu antara lain gunung Welirang (3.156 meter), gunung Panderman (2.010 meter), serta gunung Arjunodengan ketinggian (3.339 meter).²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Rakyat Indonesia Nomor 12 tahun 1993Peraturan menyatakan Kecamatan Batu sendiri berubah dan betransformasi menjadi kota Administratif. Kota Batu sebelumnya juga termasuk bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian diputuskan untuk menjadi kota administratif. Kota Batu sendiri memiliki tiga kecamatan yaitu antara lain kecamatan Batu, Bumiaji dan Junrejo. Wilayah Kotif Batu seluas 18.697 ha atau 136,74 km². Data ini belum tercatat luas daerah hutan cagar alam dan margasatwa Hutan Lindung Gubernur Surya di wilayah utara. Begitu juga luas badan jalan Provinsi, tanah

¹ BPS. Kota Batu. 2015. hlm.1

² <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/batu.pdf>

irigasi sungai, tanah sebagai jalur telepon dan listrik tegangan tinggi, sehingga luas sepenuhnya diperkirakan 753,72 ha.³

Kota Batu/Kota Wisata Batu (KWB) berkembang dan melakukan pemekaran dari Kabupaten Malang pada tahun 2001 yang di dasarkan pada hukum Undang Undang Nomor 11 Tahun 2001. Kota Batu sendiri adalah kota yang relatif baru jika dibanding kota lain dengan nuansa kota yang masih kental dengan suasana pedesaan yang menjadi ciri khas Kota Batu itu sendiri.

Daerah Kota Batu mempunyai keunggulan dibidang perkebunan, pertanian, sayuran, peternakan, serta panorama perbukitan atau pegunungan yang memiliki pemandangan yang indah. Sebagai daerah yang memiliki banyak pegunungan membuat Kota Batu memiliki lahan yang subur sehingga Kota Batu sendiri dikenal dengan hasil pertaniannya. Daerah Kota Batu dikelilingi oleh pegunungan sehingga membuat udara disana masih terjaga, hal tersebut yang menjadi minat masyarakat atau daya tarik tersendiri sehingga wisatawan mancanegara maupun domestik untuk pergi kedaerah wisata Kota Batu guna melihat dan menikmati keindahan alam Kota Batu sendiri. menikmati keindahan alam Kota Batu. Kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan alam Kota Batu membuat wilayah Kota Batu disamakan dengan sebuah negara di Eropa yaitu Swiss dan dijuluki sebagai Swiss Kecil di Pulau Jawa atau De Kleine Zwitserland.⁴

B. Luas Daerah

Kota Batu memiliki luas daerah sekitar 19908,72 ha atau sekitar 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Dengan rincian luas Kecamatan Junrejo

³ Hariyono. 2015. *Pokja Pendiri Kota Batu*. hlm.210

⁴ <http://digilib.isi.ac.id/3470/2/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf>

2.565,02 Ha, Kecamatan Bumiaji: 12.797,89 Ha, dan Kecamatan Batu: 4.545,82 Ha.⁵ Sebagai daerah yang memiliki topografi perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang menawan, sehingga banyak bermunculan tempat-tempat wisata di Kota Batu yang mengandalkan keindahan alam.

Tabel 3.1
Total Luas Penggunaan Lahan menurut Kecamatan di daerah
Kota Batu (Ha), 2016

Kecamatan	Penggunaan Lahan			Jumlah
	Pertanian bukan Sawah	Bukan Pertanian	Sawah	
Batu	2 061.48	1 833.55	650.78	4 545.81
Junrejo	2 061.48	98.63	1 062.00	2 565.02
Bumiaji	10 931.06	1 179.87	686.96	12 797.89
Kota Batu	14 396.93	3 112.05	2 399.74	19 908.72

Sumber : BPS Kota Batu 2016

C. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Batu Per 31 Desember 2018 sebesar 211.869 jiwa yang tersebar di 3 Kecamatan, Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Batu sebesar 97.107 jiwa yang terbagai ke dalam 30.111 kepala keluarga sedangkan Kecamatan Junrejo merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni sebanyak 53.041 jiwa yang terbagi ke dalam 16.656 kepala Keluarga. Kepadatan penduduk di Kota Batu sendiri selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan penduduk yang terjadi disebabkan karena Kota Batu sendiri merupakan wilayah otonomi baru

⁵ BPS.Kota Batu.hlm.1

yang merupakan kota tujuan kegiatan ekonomi. Hal tersebut di perkirakan akan bertambah seiring dari tahun ke tahun.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk dan Kecepatan (Laju) Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2010, 2016, dan 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2010	2016	2017	2010-2016	
Bumiaji	55 624	58 108	58 414	4.47	0.53
Batu	88 178	94 132	94 966	6.75	0.89
Junrejo	46 382	50 079	50 617	7.97	1.07
Kota Batu	190 184	202 319	203 997	6.38	0.83

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

Berdasarkan Tabel 3.1 pada tahun 2016 terdapat kenaikan jumlah pertumbuhan yakni 202.319 jiwa. Dengan luas daerah 19,908 km², dengan tingkat kerapatan penduduknya sebesar 1.080 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk di wilayah Kota Batu sendiri seiring bertambahnya tahun mengalami kenaikan, hal tersebut merupakan dampak dari daerah berkembang atau otonomi yang sedang mengembangkan peningkatan kegiatan pembangunan ekonomi.⁶

D. Profil Dinas Ketahanan Pangan

Di Kota Batu sendiri Ketahanan Pangan telah banyak mengalami pergantian atau perubahan baik itu bergabung dengan Dinas lain atau berganti nama. Kantor ketahanan pangan terbentuk pada tahun 2003 yang merupakan salah satu bagian

⁶ Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

dari Dinas Pertanian di Kota Kota Batu. Hal tersebut tercatat didalam Perda Kota Batu no 16 tahun 2003 mengenai Susunan oragnisasi dan Tata kerja (SOTK) pada Dinas Pertanian di daerah Kota.pada Tahun 2008 Ketahanan pangan sendiri menjadi anggota dari sekretaiat daerah (sekda) pada divisibagian Perekeonomian sekretaris Daerah Tahun 2008 Kantor ketahanan pangan menjadi anggota dari Sekretariat Daerah (SekDa) pada divisi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah setelah 5 tahun bergabung dengan Dinas Pertanian.⁷ Kemudian berdasarkan Perda Kota batu nomor 5 tahun 2016 mengenai pembentukan susunan perangkat daerah menyatakan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah menyatakan bahwa pertanggung jawab dalam bidang ketahanan pangan di Kota Batu merupakan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan yang fungsi dan tugasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Visi Misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu

Kota Batu memiliki visi dan misi yaitu “Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional ditunjang oleh Pendidikan yang tepatguna dan berdaya saing ditopang oleh sumberdaya (alam, manusia dan budaya lokal) yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”, juga berupaya mengatasi isu konflik atau permasalahan Pangan yang berada di Daerah Kota Batu, adapun Visi yang dimiliki dinas Ketahanan pangan Kota batu sendiri yaitu **“Terwujudnya Stabilitas Ketahanan Pangan Berbasis Sumber Daya Wilayah Menuju Masyarakat Sejahtera”**.

⁷ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.

Pada Misi yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu sendiri merupakan jabaran umum yang akan dilakukan untuk mencapai visi yaitu:

1. Memantapkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, daerah dan wilayah melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah
2. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat/petani untuk membangun ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya lokal, melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan dan terdesentralisasi.
3. Meningkatkan konsumsi melalui penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya dan budaya lokal yang beragam, bermutu, aman, halal dan bergizi untuk mengantisipasi kerawanan pangan di daerah dan wilayah
4. Mewujudkan aksesibilitas pangan di masyarakat melalui pengembangan distribusi pangan lintas wilayah.⁸

2. Fungsi dan Tugas Pada Tiap Bidang

Berdasarkan jabaran diatas dapat disebutkan bahwa dasar dari pembentukan struktur Dinas Ketahanan Pangan pada Pemerintahan Kota Batu berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 tahun 2009 Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 13 Tahun 2009 mengenai perubahan atas Perda daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 mengenai tata kerja serta susunan organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dengan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu pasal 19 A ayat 1, susunan organisasi si organisasi Dinas Ketahanan pangan Kota batu yakni :

⁸ Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu (RENJA) 2019

1. Kepala Dinas

Dalam Jabatan seperti Kepala Dinas memiliki fungsi dan tugas dalam hal merumuskan kebijakan, membina administrasi, merencanakan serta mengendalikan, mengevaluasi serta mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang ketahanan pangan. Pimpinan Dinas memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola Dinas Ketahanan Pangan,

2. Bagian Tata Usaha

Pada Bagian tata Usaha memiliki fungsi membuat pelaporan dan penyusunan kepada suatu program serta ketatalaksanaan, ketatausahaan urusan rumah tangga, kegiatan, ketahanan pangan, perlengkapan, publikasi, kehumasan serta keuangan.

3. Bidang Kerawanan dan Ketersediaan Pangan

bidang Kerawanan dan Ketersediaan Pangan ini mempunyai kewenangan dalam penyusunan perencanaan, membimbing, evaluasi dan melaksanakan pengendalian kepada suatu kondisi akan kerawanan serta ketersediaan pangan.

4. Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan

Bidang ini memiliki tugas dalam mengolah data informasi, memfasilitasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan dan menyusun rencana

5. Bidang Distribusi Pangan

Bidang ini memiliki tugas dalam fasilitas pengembangan akses distribusi pangan serta mengolah data Informasi, menyusun rencana juga mengendalikan harga pangan.

Berdasarkan uraian diatas Dinas Ketahanan Pangan bertugas dalam melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah secara lebih terperinci di Bidang ketahanan pangan . Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Ketahanan pangan sendiri juga memiliki fungsi yaitu menetapkan kebijakan teknis di bidang pangan, juga turut memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah pada bidang ketahanan pangan itu sendiri. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan juga memiliki bertugas dalam memberikan pelaksanaan tugas serta pembinaan ketahanan pangan serta juga bertugas menjalankan tugas yang telah diberikan Walikota Batu sesuai fungsi dan tugas Dinas yang telah diberikan.⁹

a. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

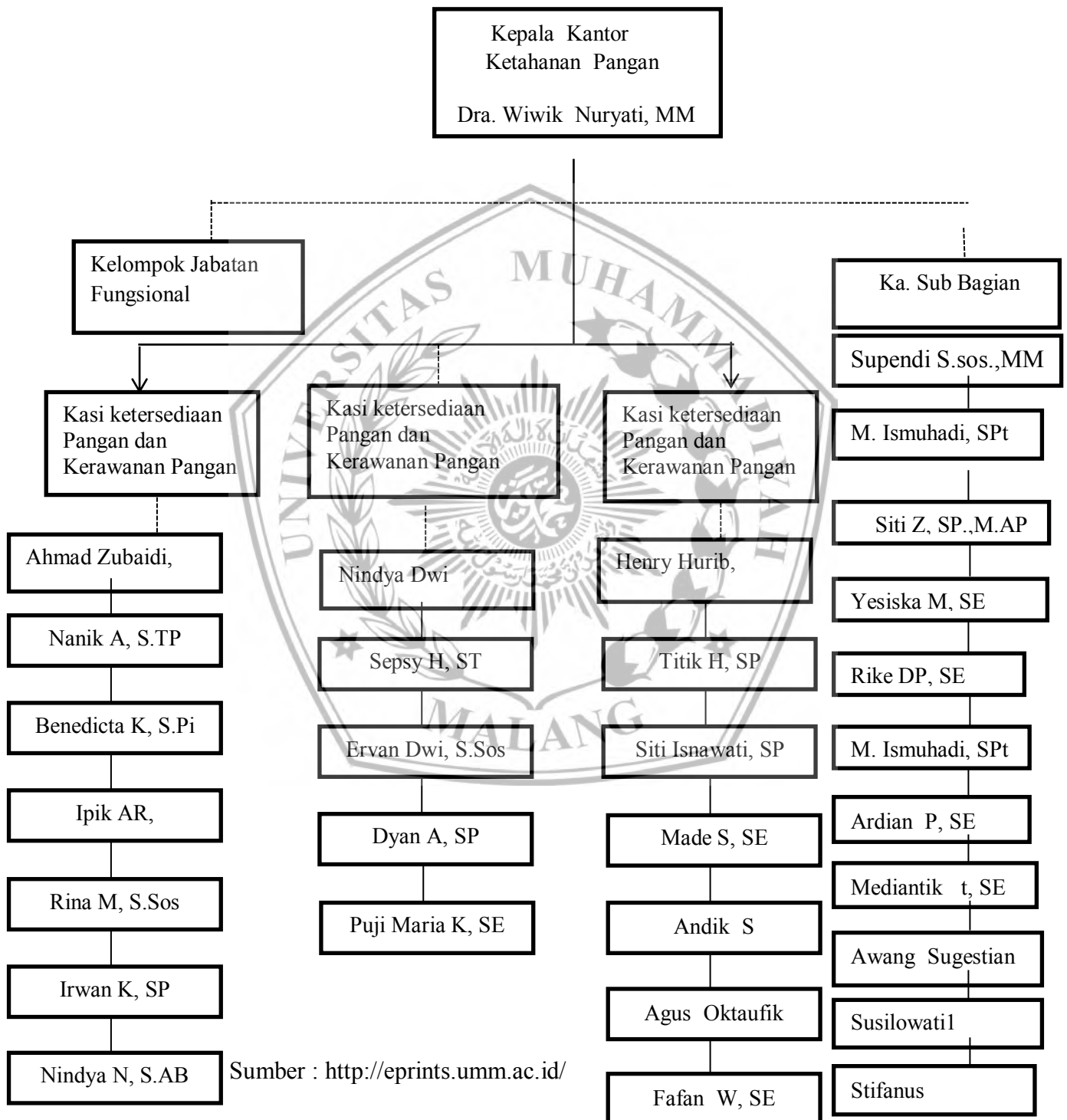
Pada Peraturan Wali Kota Batu Nomor 86 Tahun 2016 Bab II Pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perumusan rencana strategis serta kebijakan di dalam bidang ketahanan pangan yang baik.
2. Pelaksanaan kebijakan pada bidang ketahanan pangan.
3. Penetapan anggaran dan rencana kerjadi bidang ketahanan pangan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan.
5. Penyelenggaraan peningkatan kualitas aparatur sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan.
6. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan, anggaran dan pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan.

⁹ Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu tahun 2018-2022

7. Melaksanakan fungsi lain yang diprintahkan atau diputuskan oleh walikota terkait dengan fungsi dan tugasnya.¹⁰

BAGAN 3.1
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan



¹⁰ <https://ketahananpangan.batukota.go.id/profile/>

E. Pemetaan Kerawanan Pangan

Berdasarkan administrasinya, Kota Batu memiliki 3 kecamatan dengan setiap kecamatan memiliki jumlah keseluruhan 238 RW/RT 5 19 desa dan juga 5 kelurahan. Berdasarkan analisis ketahanan pangan diketahui bahwa Kota Batu mempunyai 1 desa (4.17%) yang masuk dalam kategori sangat rawan pangan, 2 desa (8.33%) yang masuk dalam kategori rawan pangan, 8 desa (33.33%) yang masuk dalam kategori agak rawan pangan, 10 desa (41.67%) yang masuk dalam kategori cukup tahan pangan dan 3 desa (12.5%) yang masuk dalam kategori tahan pangan.¹¹

Di Kota Batu sendiri masih memiliki banyak masyarakat miskin yang masih belum mendapatkan akses program bantuan pangan yang berasal dari pemerintah pusat. Pada tahun 2017 terdapat 3100 Kepala Keluarga (KK) dengan keterangan tidak mendapat Program Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai.¹²

Tabel 3.3

Penerima Program Pemberian Bantuan Sosial Pangan Beras
Kepada Masyarakat Miskin Rawan Pangan

NO	DESA / KELURAHAN	Jumlah Kepala Keluarga AWAL
KECAMATAN BUMIAJI		
1	Desa Gunungsari	186
2	Desa Tulungrejo	83
3	Desa Sumberbrantas	153
4	Desa Punten	99
5	Desa Sumbergondo	43
6	Desa Bulukerto	115
7	Desa Bumiaji	48
8	Desa Pandanrejo	139
9	Desa Giripurno	194
JUMLAH		1.060

¹¹ Asmara Rosihan, Nuhfil Hanani dan Mutisari Rini.2012. Analisis Ketahanan Pangan di Kota Batu, AGRISE ,Malang . Volume XII No. 3

¹² Perwali no 17 tentang pemberian pangn kepada masyarakat miskin rawan pangan tahun 2017

KECAMATAN JUNREJO		
10	Desa Torongrejo	169
11	Desa Pendem	65
12	Desa Tlekung	58
13	Desa Beji	94
14	Desa Mojorejo	125
15	Kelurahan Dadaprejo	184
16	Desa Junrejo	98
JUMLAH		793
KECAMATAN BATU		
17	Kelurahan Sisir	225
18	Desa Pesanggrahan	412
19	Kelurahan Temas	129
20	Desa Sidomulyo	47
21	Kelurahan Ngaglik	97
22	Desa Oro-oro Ombo	104
23	Kelurahan Songgokerto	78
24	Desa Sumberejo	155
JUMLAH		1.247
TOTAL		3.100

Sumber: Hasil Rekapitulasi Monitoring dan Evaluasi Dinas Ketahanan Pangan 2018

a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan)

Desa Mandiri Pangan sendiri merupakan salah satu mengembangkan Desa rawan pangan dengan potensi sumber daya alam berupa peningkatan modal untuk mengembangkan usaha masyarakat miskin melalui pengembangan Lembaga Keuangan Desa (LKD), hingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan yang berdampak positif untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana upaya masyarakat sebdiri dapat berkembang sehingga masyarakat mampu memenuhi pendapatan dan kebutuhan pangan juga dapat meningkat.¹³

¹³ Renstra Dinas Ketahan Pangan Kota Batu tahun 2018-2022

b. Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga dalam rangka menunjang tercapainya konsumsi pangan bergizi, beragam, seimbang dan aman (B2SA) sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.¹⁴

c. Program bantuan sosial beras kepada keluarga miskin rawan pangan

Pemerintah Kota Batu sendiri memiliki beberapa program yang mendukung perwujudan ketahanan pangan sendiri Kota Batu yang meliputi program-program seperti Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan program Desa Mandiri Pangan. Namun kedua program ini merupakan program dekonsentrasi dari pemerintah pusat. Sementara itu, Pemerintah Kota Batu sendiri memiliki Kebijakan berupa Surat Keputusan (SK) Walikota Batu Nomor: 188.45/204/KEP/422.012/ 2018 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beras Kepada Keluarga Miskin Rawan Pangan Tahun 2018. Program bantuan sosial beras kepada keluarga miskin rawan pangan adalah sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan budaya pola konsumsi pangan yang memiliki gizi tinggi, beragam dan seimbang, serta aman (B2SA).

1. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana alam dan bencana sosial
2. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

¹⁴ Renstra Dinas Ketahan Pangan Kota Batu tahun 2018-2022

Dalam RPJMD kota batu tahun 2018-2022, dimana Dinas Ketahanan Pangan turut berperan dalam proses pencapaian prioritas misi pembangunan ke-3 (tiga), yaitu mewujudkan daya saling perekonomian daerah yang progresif, mandiri berbasis agrowisata, maka prioritas pembangunan ketahanan pangan di Kota Batu diarahkan pada:

1. Kebijakan untuk pengentasan masyarakat (rumah tangga) rawan pangan menjadi masyarakat (rumah tangga) mandiri pangan.
2. Kebijakan untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat daerah maupun tingkat rumah tangga secara merata sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya kelembagaan, dan potensi lokal yang ada.
3. Peningkatan Kualitas Gizi dan Keanekaragaman Pangan Melalui Pola Pangan Harapan (PPH) kepada masyarakat.

Dalam hal ini akan terealisasi apabila 3 (tiga) Sub Sistem Ketahanan Pangan dapat berfungsi dengan semestinya sub sistem tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan jumlah pangan yang cukup
- b. Pendistribusian pangan yang lancar dan merata, serta
- c. Pengkonsumsian pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan dengan tidak melupakan keamanan pangan dan kehalalannya.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya ketahanan pangan di daerah yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan didukung dengan sasaran program adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup dan cadangan pangan daerah pemerintah
2. Meningkatnya kualitas pangan dan gizi serta keamanan pangan.
3. Terwujudnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan.
4. Terwujudnya penanganan kerawanan pangan

Pemerintah daerah senantiasa menggerakkan program ini agar masyarakat bisa menghindari potensi kerawanan pangan dengan program mandiri pangan yang bertujuan untuk mengurangi rawan pangan serta meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin (rawan pangan) melalui distribusi ke setiap kelurahan atau desa sebagai titik bagi/ambil bagi penerima bantuan.¹⁵



¹⁵ Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu tahun 2018-2022